UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERHADAP SITA EKSEKUSI PERSEPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Sakila Andra¹, Fauziah Lubis²

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

syakilaandra@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

ABSTRACT; *The purpose of this research is to understand the mechanism of filing third-party opposition and the application of caution principles by the District Court in deciding on the execution seizure of third-party property. The problem studied is the procedure for filing third-party opposition and the application of caution principles by the District Court in deciding on the execution seizure of third-party property. The research method uses legal and conceptual approaches, along with a literature review (library research). The research results indicate that although third-party opposition is not specifically regulated in the HIR and RBg, judicial practice accepts third-party resistance as the owner of seized property. Filing third-party opposition must be done before the execution is carried out and requires strong evidence of ownership. The District Court is required to apply caution principles in the seizure process to ensure fairness and protection of the rights of third parties. Thus, this research contributes to understanding the mechanism of third-party opposition and the importance of caution principles in the civil law process in Indonesia.*

Keywords: *Derden Verzet, Seizure Execution, Civil Procedure Law*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengajuan derden verzet dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pengadilan Negeri dalam memutuskan sita eksekusi terhadap barang milik pihak ketiga. Permasalahan yang diteliti adalah tata cara mengajukan derden verzet dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh Pengadilan Negeri dalam memutuskan sita eksekusi terhadap barang milik pihak ketiga. Metode penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan dengan jenis studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun derden verzet tidak diatur secara spesifik dalam HIR dan RBg, namun praktik peradilan menerima perlawanan pihak ketiga sebagai pemilik barang yang disita. Pengajuan derden verzet harus dilakukan sebelum eksekusi dilaksanakan dan memerlukan pembuktian kepemilikan barang yang kuat. Pengadilan Negeri diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyitaan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak pihak ketiga.

Kata Kunci: Derden Verzet, Sita Eksekusi, Hukum Acara Perdata

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus pihak ketiga (derden) yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan (sita eksekusi) dalam sengketa perdata, karena putusan tersebut dianggap merugikan mereka. Derden verzet, atau perlawanan pihak ketiga, adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara namun merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Dalam konteks sita eksekusi, derden verzet dapat diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki hak atas harta yang disita atau dikenai eksekusi.

Perlawanan pihak ketiga dalam pelaksanaan putusan pengadilan dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang mengadopsi beberapa prinsip dari hukum perdata Belanda. Sejarah hukum menunjukkan bahwa derden verzet adalah mekanisme untuk melindungi hak pihak ketiga yang terancam oleh putusan pengadilan. Perkembangan hukum acara perdata di Indonesia bertujuan menyeimbangkan kepentingan pihak yang berperkara dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Penelitian ini penting mengingat peningkatan jumlah kasus perlawanan pihak ketiga dalam eksekusi putusan pengadilan, menunjukkan perlunya pemahaman lebih dalam tentang mekanisme derden verzet dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pihak ketiga. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus ini, menegaskan urgensi untuk memberikan solusi efektif dalam sistem hukum perdata (Harvinto & Hartono, 2009).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara mengajukan derden verzet atas pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana Pengadilan Negeri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan sita eksekusi terhadap barang milik pihak ketiga yang terlibat dalam suatu perkara hukum dengan pihak lain?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara mengajukan derden verzet atas pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Negeri

2. Untuk mengetahui Pengadilan Negeri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan sita eksekusi terhadap barang milik pihak ketiga yang terlibat dalam suatu perkara hukum dengan pihak lain

TINJAUAN PUSTAK

Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah mengatur tata cara peradilan untuk menyelesaikan sengketa antara individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya, di luar ranah pidana (Mertokusumo & Sudikno, 2009). Sengketa perdata mencakup konflik hukum terkait hak dan kewajiban pihak-pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana.

Hukum acara perdata menangani berbagai kasus seperti gugatan perdata, perceraian, pembagian harta warisan, perjanjian kontrak, dan gugatan bisnis. Fokus utama hukum ini adalah mengatur prosedur peradilan, mulai dari pendaftaran gugatan, pengajuan bukti, proses persidangan, hingga pemberian keputusan pengadilan.

Tujuan hukum acara perdata adalah memastikan proses peradilan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga hak-hak pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi selama proses peradilan. Selain itu, hukum ini juga mengatur aspek praktis seperti yurisdiksi pengadilan, batas waktu pengajuan gugatan (preskripsi), dan peran pengacara serta hakim dalam proses peradilan. Semua ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sumber Hukum Acara Perdata

Dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi" karya Endang Hadrian, hukum acara perdata di Indonesia masih mengadopsi hukum acara perdata yang berasal dari Belanda (Hadrian & dkk, 2020). Sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia mencakup:

1. Herziene Indonesisch Reglement (HIR): Merupakan peraturan yang terbagi menjadi dua bagian, yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Bagian hukum acara perdata HIR mencakup Pasal 115 sampai dengan 245, dengan Pasal 372 hingga 394 yang mengatur berbagai aspek hukum acara pidana dan acara perdata.
2. Reglement Voor de Buitengewesten (RBg): Reglemen ini merupakan pengganti dari berbagai peraturan reglemen yang berlaku hanya di daerah tertentu di luar Jawa dan Madura. daerah tertentu di luar Jawa dan Madura.

3. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV): Merupakan reglemen yang mengatur ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk golongan Eropa dan yang disamakan dengan mereka dalam perkara di muka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht.

Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Beberapa asas hukum acara perdata yang penting antara lain (Muqaddas & Busyro, 2002):

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini menjelaskan bahwa hakim harus menunggu perkara atau gugatan diajukan oleh pihak yang terlibat, dan tidak boleh aktif mencari perkara atau "menjemput bola" dari masyarakat. Namun, ketika suatu perkara diajukan, hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun.

2. Hakim Pasif

Hakim dalam hukum acara perdata harus bersikap pasif dan tidak menentukan luasnya pokok sengketa dalam suatu perkara. Keputusan tentang mengajukan gugatan, seberapa besar tuntutan, serta kelanjutan atau penghentian perkara ditentukan oleh pihak yang terlibat, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan menilai bukti yang disajikan oleh pihak-pihak terkait kebenaran dalilnya.

3. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Sidang perkara perdata di pengadilan harus terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU 48/2009. Ini berarti setiap orang memiliki hak untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara di pengadilan. Ketika sidang tidak terbuka untuk umum, putusan yang diucapkan menjadi batal demi hukum. Meskipun ada pengecualian seperti dalam kasus perceraian atau perzinaan, di mana persidangan bisa dilakukan secara tertutup, tetapi sebelum itu, persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak (Horen Van Beide Partijen).

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 121 serta Pasal 132 HIR menegaskan bahwa pengadilan dalam hukum acara perdata harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama, memberi kesempatan yang sama untuk berpendapat,

tidak memihak, dan mengadili sesuai hukum tanpa membedakan orang. Prinsip ini juga dikenal sebagai "prinsip kesetaraan" atau "audi et alteram parte". Hakim harus adil dengan mendengar kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

5. **Putusan Harus disertai Dengan Alasan (Motivering Plichtvoeldoende gemotiveerd).**
Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili. Hal ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak yang terlibat, pengadilan yang lebih tinggi, serta ilmu hukum. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 319 HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. **Beracara Dikenakan Biaya**
Perkara pada dasarnya memerlukan pembayaran biaya, termasuk biaya kepaniteraan, panggilan pemberitahuan para pihak, biaya materai, dan biaya pengacara. Bagi yang tidak mampu, mereka dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (pro deo) dengan izin dari kepala polisi dan dibebaskan dari biaya perkara. (Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, 183, dan 23 HIR).
7. **Tidak ada Keharusan Mewakilkkan**
HIR tidak memaksa pihak-pihak untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain, namun mereka dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa jika diinginkan. Hakim tetap harus memeriksa sengketa yang diajukan, meskipun pihak-pihak tidak mewakilkan kuasa. Ada persyaratan tertentu untuk bertindak sebagai kuasa, termasuk menjadi sarjana hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, kelancaran jalannya peradilan, dan mendapatkan putusan yang adil.
Perwakilan dapat terjadi melalui ketentuan undang-undang, perjanjian kuasa khusus dengan pengacara atau penasihat hukum, atau tanpa surat kuasa khusus dalam acara gugatan perwakilan kelompok oleh beberapa orang dari kelompoknya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002).
8. **Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**
Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan tiga hal penting: Sederhana: Formalitas dalam beracara harus jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit. Semakin sedikit formalitas, semakin baik. Cepat: Peradilan harus

berjalan dengan cepat dan proses penyelesaian perkara tidak boleh berlarut-larut, agar tidak harus dilanjutkan oleh ahli waris. Biaya ringan: Biaya perkara harus serendah mungkin sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya yang tinggi dapat membuat orang enggan beracara di pengadilan (Arief, 2016).

Pengertian Derden Verzet

Perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* adalah tindakan hukum oleh pihak ketiga yang semula tidak terlibat dalam suatu perkara, namun merasa berkepentingan terhadap barang yang disengketakan atau disita dalam perkara tersebut. Mereka mengajukan perlawanan karena percaya bahwa barang tersebut adalah milik mereka, bukan milik tergugat (Rasaid, 2010).

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa jenis sita yang dapat diajukan oleh pihak ketiga melalui *derden verzet*, yaitu:

1. Sita conservatoir: Sita ini dilakukan untuk mengamankan barang-barang yang akan menjadi objek eksekusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
2. Sita revindicatoir: Sita ini diajukan atas barang bergerak yang merupakan milik penggugat namun saat ini dikuasai oleh tergugat. Tujuannya adalah untuk merebut kembali barang tersebut dengan klaim sebagai pemilik sah.
3. Sita eksekusi: Sita ini dilakukan berdasarkan hak milik untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan barang yang disita adalah milik pihak yang memenangkan perkara. Tujuannya adalah untuk menegakkan hak milik yang diakui oleh pengadilan (Harahap, 2015).

Derden verzet memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh penyitaan barang dalam suatu perkara. Mereka dapat mengajukan perlawanan untuk membuktikan kepemilikan barang yang disita adalah miliknya, bukan milik tergugat, sehingga dapat meminta pembatalan atau perubahan keputusan penyitaan.

Objek Perlawanan Derden Verzet

Pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan atau eksekusi atas barang miliknya yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang memutuskan perkara, meskipun pihak ketiga tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. Perlawanan hanya dapat diajukan jika barang yang dieksekusi dianggap sebagai hak milik dari pihak yang melakukan perlawanan (Busthami, 2021).

Pasal 195 ayat (6) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) mengatur: “Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, dan perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu” (Harahap, 2015).

Derden verzet harus diajukan kepada pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi di wilayah di mana eksekusi dilakukan. Ini menjamin penyelesaian perselisihan kepemilikan barang yang disita atau dieksekusi oleh pengadilan yang berwenang. Dalam konteks hukum perdata, derden verzet memungkinkan pihak ketiga mempertahankan hak miliknya dan meminta pembatalan atau perubahan keputusan penyitaan, menjaga hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Macam-Macam Derden Verzet

Dalam praktek terdapat dua macam derden verzet yaitu (Hermawati & Rasyid, 2015)

1. Perlawanan derden verzet terhadap sita eksekusi

Pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi ketika barang yang disita diakui sebagai milik pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut tidak terlibat dalam perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan.

2. Perlawanan derden verzet terhadap sita jaminan

Perlawanan pihak ketiga adalah tindakan hukum melawan penyitaan yang dilakukan sebagai jaminan berdasarkan putusan pengadilan yang belum tetap. Pihak ketiga meyakini barang yang disita adalah miliknya, sehingga dia mengajukan perlawanan untuk membuktikan klaim kepemilikannya dan meminta pembatalan sita jaminan tersebut. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan penyitaan atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Dengan mekanisme ini, pihak ketiga dapat mengajukan bukti dan argumen untuk mendukung klaim kepemilikannya dan meminta agar penyitaan tersebut dibatalkan atau diubah.

Pengertian Sita Eksekutorial

Penyitaan atau sita, berasal dari istilah Belanda "Beslag," yang merujuk pada tindakan memasukkan paksa harta tertentu ke dalam pengawasan atau keadaan penjagaan. Tindakan

penjagaan ini dilakukan berdasarkan perintah resmi atau legal dari pengadilan negeri. Barang yang dimasukkan ke dalam penjagaan adalah barang yang menjadi objek sengketa, tetapi juga bisa menjadi barang yang akan dilelang sebagai pelunasan utang tergugat. (Harahap, 2015).

Pada dasarnya makna sita eksekusi yang dapat dirangkum dalam pasal 197 dan pasal 200 ayat (1) HIR adalah tindakan penyitaan harta kekayaan dari pihak yang diminta atau debitur setelah melewati masa peringatan yang ditentukan. Ini bertujuan sebagai jaminan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang mengajukan permohonan. Pembayaran tersebut dapat dilunasi dengan menjual harta kekayaan yang disita melalui lelang. (Harahap, 2017).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sita eksekutorial adalah Sita eksekutorial adalah tindakan hukum yang memaksa harta tergugat ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan negeri untuk menjamin pelunasan utang melalui lelang. Hal ini dilakukan setelah tenggang waktu peringatan berakhir dan bertujuan untuk memastikan pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak pemohon.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang melibatkan kajian terhadap seluruh regulasi terkait perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dalam hukum acara perdata. Pendekatan konseptual menganalisis pemikiran dan doktrin hukum terkait isu tersebut, untuk mengidentifikasi gagasan, konsep, dan prinsip hukum yang relevan (Marzuki, 2010).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pembuatan peraturan, dan yurisprudensi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, HIR, RBg, RV, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991. Data sekunder berupa informasi dari bahan pustaka seperti jurnal, karya ilmiah, makalah, artikel, dan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data melalui literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan masalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dalam hukum acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tata cara mengajukan derden verzet atas pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Negeri

a. Syarat pengajuan Derden Verzet atas Sita Eksekusi.

Meskipun derden verzet tidak diatur secara khusus dalam HIR dan RBg, dalam praktik peradilan, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang disita dapat diterima. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1962 No.06K/Sip/1962 (Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270).

Ketentuan hukum acara terkait perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, yang menyatakan:

- Ayat (6): Perlawanan terhadap putusan juga dapat diajukan oleh orang lain yang menyatakan barang yang disita sebagai miliknya. Perlawanan ini akan diadili oleh Pengadilan Negeri yang melaksanakan putusan tersebut.
- Ayat (7): Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan tersebut harus diberitahukan segera oleh ketua pengadilan yang menerima perlawanan kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara awal.

Dari ketentuan Pasal 195 HIR ayat (6) dapat disimpulkan bahwa:

- Pelaksanaan putusan pengadilan bisa melibatkan penyitaan barang-barang atau tindakan pelaksanaan lainnya.
- Pihak ketiga yang merasa dirugikan atau tidak menerima penyitaan dapat mengajukan perlawanan (verzet).
- Perlawanan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan penyitaan atau eksekusi, bukan pengadilan yang memutus perkara awal.
- Pengadilan yang melaksanakan penyitaan atau eksekusi wajib memeriksa dan memutus perkara derden verzet.
- Jika ada perlawanan seperti yang diatur dalam ayat (6), ketua pengadilan yang memutus perkara pokok akan diberitahukan.
- Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut harus memberitahukan putusnya kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara pokok.
- Jika ada banding terhadap putusan mengenai derden verzet, maka peraturan yang berlaku untuk perkara lainnya juga berlaku untuk banding tersebut.

Syarat lain agar perlawanan dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi adalah harus diajukan sebelum eksekusi dilakukan. Jika eksekusi sudah selesai, tidak ada relevansi untuk menunda eksekusi. Yurisprudensi, seperti dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, menegaskan bahwa perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (Harahap, 2017).

Perlawanan yang diajukan harus mencantumkan alasan-alasan yang kuat, di mana pihak ketiga harus membuktikan bahwa mereka adalah pemilik sah dari objek yang disita. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan bila barang yang disita adalah miliknya, bukan milik pihak yang kalah dalam perkara, dan tidak terkait dengan pokok perkara.

Dengan demikian, pengajuan perlawanan oleh pihak ketiga akan dipertimbangkan oleh hakim jika pihak ketiga dapat membuktikan klaim kepemilikannya dengan kuat.

b. Cara Mengajukan Gugatan Derden Verzet

Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II Mahkamah Agung RI), pengajuan derden verzet harus didaftarkan sebagai perkara baru di pengadilan yang memeriksa perkara atau putusan yang dilawan. Derden verzet merupakan upaya hukum luar biasa yang tidak menanggguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Derden Verzet:

- Pengajuan Gugatan: Gugatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan.
- Pendaftaran Gugatan: Gugatan harus didaftarkan di pengadilan negeri yang bersangkutan.
- Batas Waktu Pengajuan: Gugatan harus diajukan dalam tenggang waktu 8 hari setelah diberitahukan penyitaan.
- Proses Pemeriksaan: Pengadilan negeri akan memeriksa gugatan, tetapi hal ini tidak menghalangi proses penyitaan, kecuali jika ketua pengadilan negeri memerintahkan penundaan lelang sampai putusan dibuat.
- Konsekuensi Perlawanan Diterima: Jika perlawanan diterima, maka segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akan dibebankan pada pihak yang meminta penyitaan.

- Tindakan Jika Perlawanan Ditolak: Jika perlawanan ditolak, pihak yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan perlawanan dibacakan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, *derden verzet* adalah upaya hukum luar biasa yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melawan suatu putusan yang merugikan haknya. Gugatan *derden verzet* harus diajukan dan didaftarkan sebagai perkara baru di pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Jika gugatan *derden verzet* dikabulkan, maka putusan yang dilawan harus diperbaiki hanya dalam hal yang merugikan pihak ketiga, kecuali jika putusan tersebut tidak dapat dipecah dan memerlukan pembatalan putusan secara keseluruhan.

c. Tata Cara Pengalihan Hak atas Barang yang Disita

Dalam proses penyitaan, pemohon sita harus mematuhi penetapan dan perintah dari ketua pengadilan atau ketua majelis. Jurusita harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan hati-hati, karena berhadapan langsung dengan pihak yang bersengketa. Jurusita harus menjelaskan kepada tersita bahwa penyitaan tidak berarti tersita telah kalah dalam pengadilan, tetapi hanya untuk menghentikan barang sengketa agar tidak dialihkan dan tetap dalam penguasaan tersita (Sarwohadi, 2017).

Tujuan Penyitaan:

- Mengambil atau menahan barang harta kekayaan dari kekuasaan orang lain berdasarkan penetapan dan perintah ketua pengadilan atau ketua majelis.
- Barang yang telah disita tidak boleh dialihkan, diperjualbelikan, atau dipindahtangankan kepada orang lain.
- Sita merupakan tindakan hukum eksepsional yang diambil oleh pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara atau sebelum putusan, atau dilakukan saat pemeriksaan perkara sedang berlangsung.
- Menjamin hak atas barang yang disita agar tidak dialihkan, dihilangkan, atau dirusak, sehingga tidak merugikan pihak pemohon sita. Tujuannya adalah agar gugatan penggugat tidak sia-sia dan hanya menang di atas kertas.

d. Upaya Hukum Lain Jika Putusan Hakim Tidak Memenuhi Keinginan

Upaya hukum adalah mekanisme yang diberikan oleh undang-undang untuk melawan putusan hakim bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Dasar hukum banding diatur dalam Pasal 188 sampai 194 HIR untuk Jawa dan Madura serta Pasal 3 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.

Syarat Pengajuan Banding:

- **Batas Waktu:** Pengajuan banding harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan, atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan jika salah satu pihak tidak hadir.
- **Biaya Perkara:** Pemohon banding harus membayar biaya perkara banding terlebih dahulu.
- **Tempat Pengajuan:** Permohonan banding diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara.
- **Bentuk Permohonan:** Permohonan banding dapat diajukan secara tertulis dan lisan.
- **Pihak yang Berwenang Mengajukan:** Banding dapat diajukan oleh pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya yang telah mendapat kuasa khusus.

2. Pengadilan Negeri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan sita eksekusi terhadap barang milik pihak ketiga yang terlibat dalam suatu perkara hukum dengan pihak lain

a. Strategi Pengaturan Sita Eksekusi Yang Tidak Menguntungkan Pihak Ketiga

Dalam proses penyitaan dalam peradilan perdata, kehati-hatian sangatlah penting agar tidak merugikan pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa. Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang menjadi objek sengketa, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak digunakan oleh pihak yang belum ditetapkan secara hukum sebagai pemilikinya (Harahap, 2014). Ini adalah upaya untuk menghormati hak asasi manusia, karena barang yang belum jelas status kepemilikannya tidak boleh digunakan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Penyitaan (Zulkarnaen, 2017):

- **Objek yang Disengketakan:** Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus yakin bahwa objek yang akan disita benar-benar merupakan objek yang disengketakan.

Benda yang akan dikenakan penyitaan harus terkait atau merupakan hasil dari benda yang disengketakan dan dapat dijadikan barang bukti di pengadilan.

- **Permohonan Penyitaan:** Berdasarkan Pasal 226 dan 277 HIR serta SEMA No. 5 Tahun 1975, permohonan penyitaan harus dilakukan oleh penggugat, dan tidak dapat dilakukan secara ex officio oleh hakim. Permohonan bisa diajukan secara lisan atau tertulis.
- **Alasan Permohonan:** Menurut Pasal 227 HIR, permohonan penyitaan harus didasari oleh alasan kuat, seperti adanya kekhawatiran tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses persidangan.
- **Pertimbangan Objektif:** Penetapan penyitaan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif, dengan argumentasi yang jelas tentang alasan dan cara memperoleh fakta.
- **Proporsionalitas:** Penyitaan harus proporsional dengan jumlah tuntutan untuk menghindari tindakan yang berlebihan. Penyitaan dalam sengketa milik harus terbatas pada barang yang disengketakan, sedangkan dalam sengketa hutang dijamin dengan barang tertentu sampai dipenuhi jumlah tuntutan.
- **Larangan Penyitaan:** Beberapa barang tidak boleh disita, seperti barang milik negara, yang diatur dalam Pasal 197 ayat (8) HIR dan UU No. 9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Negara.
- **Penjagaan Barang Sitaan:** Penjagaan barang sitaan tidak boleh diberikan kepada penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (9) HIR, untuk menjaga netralitas.
- **Pengumuman Sitaan:** Pengumuman berita acara sita diperlukan untuk memberikan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga.

b. **Bukti Pihak Ketiga sebagai Dasar Hukum bagi Hakim dalam Memberikan Putusan yang Adil**

Pembuktian dalam perkara perdata sangat penting untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang diajukan. Ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti (Fernando, 2017):

- **Kekuatan Pembuktian yang Sempurna (Volledig Bewijskracht):** Alat bukti yang dianggap lengkap dan tidak perlu tambahan bukti lain.

- Kekuatan Pembuktian yang Lemah (Onvolledig Bewijskracht): Alat bukti yang dianggap tidak lengkap dan memerlukan tambahan bukti.
- Kekuatan Pembuktian Sebagian (Gedeeltelijk Bewijskracht): Alat bukti yang hanya membuktikan sebagian dari suatu peristiwa.
- Kekuatan Pembuktian yang Menentukan (Beslissende Bewijskracht): Alat bukti yang menentukan kebenaran suatu peristiwa.
- Kekuatan Pembuktian Perlawanan (Tegenbewijs of Kracht van Tegen Bewijs): Alat bukti yang digunakan untuk melawan atau membantah bukti lain.

Alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia meliputi bukti tulisan/surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, yang semuanya diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW. Setiap alat bukti memiliki kekuatan dan aturan penggunaan yang spesifik (Sugeng, 2015).

c. Penerapan Asas Kehati-Hatian oleh Hakim dalam Membuat Putusan Perkara Perdata

Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan asas kehati-hatian untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim harus memenuhi beberapa tujuan penting (Kusmayanti, 2020):

- Solusi Autoritatif: Memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.
- Efisiensi: Proses hukum harus cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena penundaan adalah ketidakadilan.
- Sesuai dengan Tujuan Undang-Undang: Putusan harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang menjadi dasar hukum.
- Stabilitas: Menjaga ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- Fairness: Memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang bersengketa.

Hakim harus berhati-hati dalam mempertimbangkan setiap aspek kasus untuk memberikan putusan yang adil. Peristiwa yang diajukan oleh pihak yang bersengketa harus disaring untuk menentukan mana yang relevan dan penting bagi dasar pertimbangan hukum. Hanya peristiwa yang relevan yang harus dibuktikan di pengadilan. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan dalil dan bantahan, sehingga pihak yang dapat membuktikan dasar gugatannya dengan lebih kuat akan memenangkan perkara.

B. Pembahasan

Penelitian tersebut menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep derden verzet, tata cara mengajukan derden verzet, strategi pengaturan sita eksekusi yang tidak merugikan pihak ketiga, serta penerapan asas kehati-hatian oleh hakim dalam memberikan putusan yang adil.

Pertama, konsep derden verzet dijelaskan sebagai tindakan hukum oleh pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap barang yang disengketakan atau disita. Tujuan derden verzet adalah membuktikan kepemilikan barang dan meminta pembatalan atau perubahan keputusan penyitaan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan, memungkinkan mereka untuk mengajukan bukti dan argumen guna mempertahankan hak miliknya.

Kedua, tata cara mengajukan derden verzet atas pelaksanaan sita eksekusi di Pengadilan Negeri diuraikan dengan rinci. Syarat pengajuan, proses pengajuan gugatan, batas waktu pengajuan, serta konsekuensi dari diterimanya perlawanan derden verzet disampaikan secara jelas. Penjelasan ini mencakup juga strategi pengaturan sita eksekusi yang tidak merugikan pihak ketiga, dimana asas kehati-hatian sangat penting dalam memastikan bahwa penyitaan dilakukan dengan proporsional dan objektif.

Ketiga, pembahasan mengenai tata cara pengalihan hak atas barang yang disita juga turut dipaparkan. Proses penyitaan harus mematuhi penetapan dan perintah dari pengadilan, serta harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa. Prinsip-prinsip penyitaan seperti objek yang disengketakan harus jelas, alasan permohonan penyitaan harus kuat, dan perlindungan terhadap barang sitaan juga dijelaskan dengan baik.

Terakhir, pembahasan mengenai upaya hukum lain jika putusan hakim tidak memenuhi keinginan dan penerapan asas kehati-hatian oleh hakim dalam membuat putusan menjadi poin penting dalam penelitian tersebut. Hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati setiap aspek kasus untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Beban pembuktian juga menjadi fokus, di mana pihak yang mengajukan dalil dan bantahan harus dapat membuktikan klaim mereka dengan kuat agar memenangkan perkara.

Dalam keseluruhan penjelasannya, penelitian tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep, tata cara, strategi, dan asas yang terkait dengan derden verzet,

penyitaan, dan proses peradilan yang adil dalam konteks hukum perdata. Maka dengan hal itu menegenai konsep ini sangatlah penting untuk diteliti.

KESIMPULAN

Dari hasil permasalahan yang terkait atas upaya hukum derden verzet terhadap sita eksekusi persepektif hukum acara perdata, dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diatas. Kesimpulan tersebut meliputi beberapa point yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tata cara mengajukan derden verzet di pengadilan negeri adalah proses hukum yang krusial bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan atau tindakan hukum yang melibatkan sita eksekusi atas barang miliknya. Proses ini dimulai dengan pendaftaran perkara baru di pengadilan negeri yang telah memutuskan perkara tersebut. Pihak ketiga harus mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa barang yang disita bukanlah milik tergugat melainkan milik pihak ketiga. Prosedur ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pendaftaran gugatan, pemeriksaan bukti-bukti oleh pengadilan, dan kemungkinan penundaan lelang jika perlawanan diterima oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk pihak ketiga dalam melindungi hak-haknya dari keputusan yang merugikan.
2. Prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh pengadilan negeri dalam memutuskan sita eksekusi menjadi sangat penting. Pengadilan dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan cermat, memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga terlindungi. Hakim harus melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak ketiga, untuk menghindari keputusan yang bisa merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara pokok. Prinsip ini mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan dan memberikan pemberitahuan yang tepat kepada semua pihak terkait tentang putusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi.

Keseluruhan penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme derden verzet dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pengadilan. Kedua hal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang mungkin terdampak oleh pelaksanaan sita eksekusi. Penegakan hukum yang adil dan transparan diperlukan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pihak penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang terkena dampak. Dengan demikian, mekanisme hukum ini menjadi fondasi

yang esensial dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan hak-hak yang sah dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tata Historis, Tata Hukum, dan Publik Hukum Nasional*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Busthami, Dachran S. (Februari 2021). "Perlawanan Pihak Ketiga (*derden Verzet*) Terhadap Eksekusi putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO." *Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2 No.2.
- Hadrian, Endang, & Hakim, Lukman. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*. Jogjakarta: Deepublish.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Ruang Lingkup Permasalahan Sita Eksekusi bidang perdata*. Jakarta: Sinar grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sarwohadi. (Januari 2017). "Sekitar Penyitaan." *Kompas*.
- Sugeng, Bambang. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA.
- Zulkarnaen. (2017). *Penyitaan dan Eksekusi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Dachran S. Busthami. Februari 2021. *Perlawanan Pihak Ketiga (derden Verzet) Terhadap Eksekusi putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO*. *Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2 No.2.
- Fernando. 5 Juli 2017. *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*. *Lex Crimen*, Vol 4 No. 5.
- Hazar Kusmayanti. 2 Agustus 2020. *Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*", *Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 2.
- Harvianto, R., & Hartanto, H. 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang Diskusi Pihak Ketiga (Studi Putusan nomor: 30/Pdt. G/2009/PN. Ska Jo Nomor: 347/Pdt/2009/PT. Sing Jo Nomor: 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor: 222PK/Pdt/2015)*. *Verstek*, Vol.7 (No,1), PP. 162-168.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan (On-line), Tersedia di <https://aalawoffice.com/upaya-hukum-terhadap-putusan-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2024.

Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Verzet (On-line), Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzetlt63286dfddf934/>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2024.

https://repository.unsri.ac.id/91588/17/RAMA_74201_02011281924164_0008065801_0030056401_01_front_ref.pdf. Diakses pada tanggal 02 Juni 2024

<https://pn-banyuwangi.go.id/hak-pihak-ketiga>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2024.